

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 April 2020/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUHARTATIK**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **719821**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.580.000.000**

1. Tanah Seluas 400 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 711 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 572 m2/200 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 2870 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/86 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/336 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 372 m2/250 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
9. Tanah Seluas 714 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **360.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, SUZUKI KAWASAKI Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



35.000.000

3. MOBIL, HONDA HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp.

925.699.098

**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

---

**Sub Total**

Rp.

4.865.699.098

**III. HUTANG**

Rp.

321.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

4.544.699.098

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.